



SIARAN PERS

NO. 12/SP/DP/VI/2025

Tentang

MoU Dukungan Penegakan Hukum Perlindungan Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers dan Kejaksaan Agung

Jakarta, Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, dan Jaksa Agung, ST Burhanudin, menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai Koordinasi Dalam Mendukung Penegakan Hukum Perlindungan Kemerdekaan Pers, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa 15 Juli 2025.

Nota kesepahaman ini merupakan komitmen bersama antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung untuk mewujudkan kemerdekaan pers, keterbukaan dan kolaborasi, guna mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Dewan Pers berharap semua permasalahan pers dapat diselesaikan di lingkup masyarakat pers sehingga tidak perlu berlanjut di proses hukum.

Sengketa pers atau hukum terkait dengan pers yang ditangani oleh Kejaksaan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pers. Salah satu koordinasi yang dapat dilakukan sebagaimana disebutkan di nota kesepahaman yaitu melalui permohonan keterangan ahli pers ke Dewan Pers.

Dengan dilakukannya nota kesepahaman ini, Dewan Pers dapat menjalankan tugasnya yaitu memberikan perlindungan kepada jurnalis dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kejaksaan Agung melihat peran pers yang signifikan dalam mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia. Pers dinilai dapat membantu menyebarkan informasi mengenai kinerja atau kerja kerja di Kejaksaan.

Burhanudin mengatakan Kejagung mulai menyadari pentingnya fungsi pers bagi lembaganya setelah mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo, saat masih menjabat, “Apapun yang Kejaksaan kerjakan, tanpa ada pers tidak akan sampai kepada masyarakat. Artinya, apapun yang dikerjakan Kejaksaan, masyarakat tidak tahu. Artinya lagi, kita memerlukan sarana agar masyarakat tahu apa yang Kejaksaan lakukan dan ini menjadi penilaian terhadap kinerja Kejaksaan.”

Keberadaan pers juga menjadi pengawas kinerja Kejaksaan, untuk memonitor cara teman-teman kejaksaan bekerja, terutama di daerah. Hal ini mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Foto:

https://drive.google.com/drive/folders/18QyWLTmcnRIs28YTkUL4eV5J2yr8iVDG?usp=drive_link

Narahubung:

Wienda Parwitasari (Tenaga Ahli Dewan Pers) 081282200

SIARAN PERS

NO. 11/SP/DP/VI/2025

Tentang

MoU Dukungan Penegakan Hukum Perlindungan Kemerdekaan Pers oleh Dewan Pers dan Kejaksaan Agung